

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten)**

**Anindhita Kusuma Sari
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dosen Pembimbing
Wahyu Manuhara Putra, S.E., M.Si., Ak., CA**

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the quality of local government financial reports in Klaten Regency. The subjects in this study were SKPD employees in Klaten District who worked in the field of finance / accounting / administration with certain criterias. Based on the analysis that has been carried out the results show that the Understanding of Government Accounting Standards has a positive influence on the quality of the SKPD financial statements in Klaten Regency. While the variable is the Application of Accounting Information Systems, Human Resource Competence, the Internal Control System has no influence on the quality of the Klaten SKPD financial report.

Keywords: *government accounting standards, accounting information systems, human resources, internal control systems, financial reports.*

PENDAHULUAN

Pada undang-undang No 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara periodik. . Laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah No 8 tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh kepala satuan kerja perangkat desa yang dimaksudkan pada pasal 5 ayat 2 digunakan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan yang nantinya akan disampaikan pada gubernur/bupati/walikota melalui pejabat pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan secara umum di buatnya laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan sebuah entitas, realisasi anggaran, juga arus kas dan kinerja keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas yang melakukan pelaporan yang nantinya akan memiliki manfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut dalam membuat dan juga mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang ada.

Penelitian yang dilakukan Sukmaningrum (2012) menyatakan apabila laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematatan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Masalah bisa saja timbul akibat kualitas laporan keuangan yang rendah. Kualitas laporan keuangan yang buruk bisa saja memberikan peluang bagi beberapa pihak untuk

melakukan tindak kejahatan seperti adanya tindak korupsi. Hal tersebut mungkin saja dapat terjadi karena kualitas laporan keuangan yang buruk sehingga beberapa pihak melakukan jual-beli opini audit untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Kabupaten Klaten sendiri masih mendapat opini WDP.

Tabel 1.1 memberikan data mengenai hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK pada LKPD kabupaten Kebumen selama lima tahun dihitung sejak tahun 2013-2017.

Tabel 1.1

Opini BPK untuk Laporan Keuangan SKPD Tahun 2013-2017 Kabupaten Klaten

Tahun	Opini BPK
2013	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2014	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2017	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : *semarang.bpk.go.id*

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Klaten kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK dan begitu pula pada tahun 2017 Klaten masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Klaten mengatakan bahwa opini WDP ini didapatkan oleh Kabupaten Klaten dikarenakan masalah dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga kurang patuhnya terhadap undang-undang yang berlaku¹. Diketahui rekapitulasi laporan sekolah pada dana BOS dinilai kurang valid dan andal.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didaerah lain. Beberapa diantaranya yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumberdaya manusia, dan sistem pengendalian internal. Namun hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel independen terhadap variabel dependen, berbeda satu sama lain. Terlihat adanya ketidak-konsistenan terhadap hasil yang didapatkan pada tiap penelitian.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan standar atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan atau penyusunan dan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintah yang baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik karena dengan pemahaman SAP yang baik akan memberikan laporan pertanggungjawaban yang baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Adanya penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintahan dimaksudkan untuk salah satunya memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengubah data yang ada menjadi informasi yang nantinya akan digunakan didalam pengambilan keputusan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Silviana (2014) memberikan hasil bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas suatu laporan keuangan.

¹ Artikel diterbitkan oleh Soloraya.solopos.com dengan judul “ Klaten Gagal Meraih Opini WTP dari BPK, ini penyebabnya” oleh Taufik Prakoso (2018).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis, dkk (2014) dimana sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan sistem informasi akuntansi yang ada masih belum dapat untuk mengurangi kesalahan yang terjadi.

Adanya Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, tidak dapat dipisahkan dari Sumberdaya Manusia yang ada pada pemerintahan tersebut karena SIA memerlukan SDM yang berkompeten agar integrasi sistem dapat berjalan dengan baik sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yusrawati (2015) yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik atau berkualitas perlu memperhatikan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) pada SKPD Kudus yang menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Abiola (2013) mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan juga dapat ditentukan pada seberapa baiknya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai tindakan yang dilakukan pada keuangan maupun non-keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik akan membuat kinerja pemerintah menjadi lebih optimal sehingga memudahkan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang jelas dan tepat maka akan ada pemisahan tugas terhadap para pegawai secara jelas, dan juga tidak akan ada pegawai pada pemerintahan daerah yang memiliki fungsi lebih dari satu atau merangkap lebih dari satu fungsi didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novtania, dkk (2017), Desiana dkk (2014), Nurhasanah dkk (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Brendhi (2018) mengatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah padapenelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Teory Stewardship (Stewardship Theory)

Menurut Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) dalam Haliah (2012) menyatakan teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi atas tujuan individu, melainkan sebagai pengelola yang motivasinya selaras dengan tujuan principal mereka. Dalam teori ini rakyat berperan sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*.

Mahmud (2015) mengatakan bahwa rakyat yang nantinya akan secara langsung mengawasi kinerja pemerintah sehingga membutuhkan informasi yang mendukung

jalannya pengawasan tersebut. Dimana informasi tersebut berupa laporan keuangan yang telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan kadar baik buruknya hasil dari kegiatan operasional dari suatu entitas yang dapat merupakan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, CALK dan materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah : a) relevan, b) andal, c) dapat dipahami, dan d) dapat dibandingkan

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adanya penerapan dan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang disusun oleh pegawai pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang mengharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami berbagai pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam menjalankan tugasnya (PP No. 71/2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) menyatakan bahwa SAP secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Jembrana Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cornelia dkk (2016) yang dikutip dalam penelitian I Wayan dan I Gusti (2017) juga menyatakan bahwa kualitas pada laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh efektivitas dalam penerapan standar akuntansi pemerintah. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika (2015) memberikan hasil pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Sako dkk (2018) juga menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian tersebut, variabel standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dibanding variabel-variabel lain yang ada.

H1 : Pemahaman SAP berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Didalam pelaksanaan pemerintahan daerah, sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh masing-masing SKPD yang ada didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan guna dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tanggung jawab pemerintah daerah. Pengambilan keputusan yang baik dan benar diharapkan mampu untuk memenuhi tujuan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat secara maksimal. Pada pemerintahan kabupaten Klaten sendiri, pemerintah dan perangkatnya dituntut untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan data, informasi dan pelayanan publik².

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Banda

² Diterbitkan di Klatenkab.go.id yang berjudul "Master Plan E-Governmen Pemerintah Kabupaten Klaten" pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Aceh. Semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi di Banda Aceh ini maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2013) yang menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Meilani dan Wasman (2014) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penerapan ini memberikan pengaruh terhadap dokumen atau formulir dan laporan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2014) menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kabupaten Jembrana. Penelitian yang dilakukan oleh Irzal Tawaqal dan Suparno (2017) juga menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi maka laporan yang dibuat akan memberikan hasil yang relevan dan dapat dibandingkan, hal tersebut dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan keputusan.

H2 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah.

Kompetensi Sumberdaya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia dipercaya dapat memberikan hubungan positive dimana sumberdaya manusia membawa manusia secara sosial ke dalam organisasi, yang mana cenderung berfungsi sebagai sumberdaya kritis yang menghasilkan suatu keunggulan. Teori stewardship ini dapat dianggap sebagai kemampuan untuk membantu menyelaraskan sumberdaya organisasi yang penting, seperti modal manusia dan modal sosial. Kompetensi sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas dimana sumber daya manusia tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan yang cukup atau bahkan baik. Jika yang melaksanakan fungsi ini tidak memiliki kemampuan maka akan menghambat proses akuntansi tersebut dan bahkan dapat mengakibatkan kegagalan pada proses penyusunan laporan akuntansi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ika dan Dewi (2017) menyatakan bahwa sumberdaya manusia yang terdapat di pemerintahan kabupaten Klaten yang kurang tanpa adanya kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankan tugasnya membuat banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini menyebabkan Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Maka diperlukan adanya pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian tersebut menunjukkan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang ada. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati dkk (2014), Megawati dkk (2015) dan Irzal (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil serupa didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh I Wayan dan I Gusti (2017) menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan imana semakin baik kompetensi sumberdaya

yang dimiliki maka akan semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Sumberdaya manusia berkompeten akan mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas dimana hal tersebut akan memudahkan dalam pengambilan keputusan.

H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, untuk melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian yang ada pada pemerintah daerah dirancang untuk memudahkan pegawai atau aparatur untuk mencapai tujuan dari pemerintahan daerah itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Abiola (2013) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, dkk (2010) yang menyatakan bahwa setiap dilakukannya peningkatan terhadap sistem pengendalian internal, maka akan meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2014), Meldawati Girsang (2017) juga menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan dan I Gusti (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh kabupaten bangli masih terbilang cukup rendah, hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan dokumen serta catatan yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan.

H4 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Subyek yang digunakan adalah pegawai SKPD di Kabupaten Klaten. Jenis data pada penelitian ini yaitu primer dengan menyebarkan kuisioner secara langsung. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria. Kriteria pengambilan sampel tersebut antara lain:

1. Pegawai SKPD yang bekerja melakukan fungsi akuntansi, keuangan, atau tata usaha.
2. Lama bekerja pegawai >1 tahun.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan didefinisikan sebagai baik buruknya hasil dari kegiatan operasional entitas yang berupa laporan keuangan. Pada penelitian ini terdapat 8 butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Made (2015) dengan menggunakan skala likert lima poin. Terdapat pertanyaan positif dan negatif dimana pertanyaan positif menggambarkan jawaban yang sesuai dengan harapan peneliti dan pertanyaan negatif mewakili jawaban yang tidak

diharapkan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan peneliti berharap agar responden berhati-hati dalam menjawab dan tidak terjadi konsistensi jawaban.

2. Variabel Independen

a. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Pemahaman standar akuntansi disini didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam memahami prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada penelitian ini terdapat 10 butir pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah. Terdapat pertanyaan negatif yang mana mewakili jawaban yang tidak diharapkan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan ini diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arlia (2016) dengan menggunakan skala likert lima poin.

b. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Didefinisikan sebagai proses dalam mempraktekkan kumpulan teori atau metode yang nantinya akan menjadi informasi yang kemudian dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan. Penelitian ini terdapat 5 butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Debi (2016) dengan menggunakan skala likert lima poin.

c. Kompetensi Sumberdaya Manusia

Kompetensi sumberdaya manusia merupakan baik buruknya pegawai dalam mewujudkan tujuan entitas. Pada penelitian ini terdapat 6 butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudiaranti (2015) dengan menggunakan skala likert lima poin.

d. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal ini merupakan kumpulan proses yang dilakukan oleh para pegawai untuk mencapai tujuan entitas dengan melakukan pencapaian salah satunya pada kendala laporan keuangan. Pada penelitian ini terdapat 9 butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Debi (2016) dengan menggunakan skala likert lima poin.

HASIL DAN ANALISIS

Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Klaten. Data dikumpulkan dengan menyebar kuisisioner yang dikirim oleh peneliti. Berikut adalah ringkasan pengiriman dan pengambilan kuisisioner :

Tabel 4.1
Jumlah kuisisioner dan proses penentuan sample

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang dikirim	60	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	12	20%
Kuisisioner yang tidak dapat diolah	13	21,7%
Kuisisioner yang dapat diolah	35	58,3%

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah kuisisioner yang disebar sebanyak 60 kuisisioner dan yang tidak kembali sebanyak 12 kuisisioner. Terdapat sebanyak 13 kuisisioner yang tidak dapat diolah dikarenakan hasil dari kuisisioner tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, dan juga terdapat beberapa pertanyaan yang tidak memiliki jawaban.

Pengujian instrumen yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas dan uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen yang digunakan. Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Nilai Sig. (2-tailed)	Batas	Keterangan
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan			
X1.1	0,000	0,05	Valid
X1.2	0,000	0,05	Valid
X1.3	0,000	0,05	Valid
X1.4	0,000	0,05	Valid
X1.5	0,000	0,05	Valid
X1.6	0,000	0,05	Valid
X1.7	0,000	0,05	Valid
X1.8	0,000	0,05	Valid
X1.9	0,000	0,05	Valid
X1.10	0,000	0,05	Valid
Penerapan Sistem Informasi Akuntanssi			
X2.1	0,000	0,05	Valid
X2.2	0,000	0,05	Valid
X2.3	0,003	0,05	Valid
X2.4	0,000	0,05	Valid
X2.5	0,000	0,05	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia			
X3.1	0,000	0,05	Valid
X3.2	0,000	0,05	Valid
X3.3	0,000	0,05	Valid
X3.4	0,000	0,05	Valid
X3.5	0,000	0,05	Valid
X3.6	0,000	0,05	Valid
Sistem Pengendalian Internal			
X4.1	0,002	0,05	Valid
X4.2	0,001	0,05	Valid
X4.3	0,001	0,05	Valid
X4.4	0,000	0,05	Valid
X4.5	0,000	0,05	Valid
X4.6	0,001	0,05	Valid
X4.7	0,001	0,05	Valid
X4.8	0,000	0,05	Valid
X4.9	0,000	0,05	Valid
Kualitas Laporan Keuangan			
Y1	0,001	0,05	Valid
Y2	0,000	0,05	Valid
Y3	0,037	0,05	Valid
Y4	0,000	0,05	Valid
Y5	0,004	0,05	Valid
Y6	0,000	0,05	Valid
Y8	0,000	0,05	Valid

Sumber : data primer diolah 2019

Pada tabel 4.2 hasil uji validitas yang telah dilakukan menyatakan setiap item yang ada dinyatakan valid karena nilai sig. pada setiap item $<0,05$. Hal tersebut menandakan bahwa setiap item pada kuesioner tersebut dinyatakan sah atau dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kehandalan instrumen penelitian. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha	Keterangan
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	0,976	0,7	Reliabel
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	0,734	0,7	Reliabel
Kompetensi Sumberdaya Manusia	0,710	0,7	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,706	0,7	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,731	0,7	Reliabel

Sumber : data primer diolah 2019

Bedasarkan data dari tabel 4.3 diatas seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari $>0,7$. Hal tersebut membuat seluruh instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji normalitas

Tabel 4.4
Uji Normalitas

Variabel	Kolomogorof Smirnof	Signifikansi	Keterangan
Unstandardized Residual	0,997	0,273	Berdistribusi Normal

Sumber : data primer diolah 2019

Syarat untuk berdistribusi normal yaitu nilai signifikansi harus lebih besar dari $0,05$. Pada tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa data yang ada berdistribusi normal karena nilai signifikansi sebesar $0,273 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman SAP	0,394	2,538	Tidak terjadi multikolinearitas
Penerapan SIA	0,319	3,136	Tidak terjadi multikolinearitas
Kompetensi SDM	0,568	1,761	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0,397	2,520	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : data primer diolah 2019

Dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa seluruh nilai Tolerance yang dihasilkan pada uji ini > 0,10 dan nilai VIF < 10,0 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pemahaman SAP	0,682	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Penerapan SIA	0,565	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kompetensi SDM	0,147	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SPI	0,427	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : data primer diolah 2019

Data pada tabel diatas seluruh variabel memiliki nilai sig. > 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7
Uji Regresi Linear Berganda

Variable Dependent : Kualitas Laporan Keuangan			
Variabel	Unstandardized Coefficient B	T hitung	Sig.
Pemahaman SAP	0,231	2,673	0,012
Penerapan SIA	0,060	0,219	0,828
Kompetensi SDM	-0,282	-1,664	0,107
SPI	0,103	0,602	0,551
Konstanta = 23,545			
R² = 0,369			
F hitung = 4,379			
Signifikan = 0,007			

Sumber : data primer diolah 2019

Dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa hanya variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang memiliki nilai sig. < 0,05 sehingga variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Variabel penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumberdaya manusia, dan sistem pengendalian internal memiliki nilai sig. > 0,05 sehingga variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 memiliki nilai F hitung sebesar 0,007. Nilai F < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumberdaya manusia, dan sistem pengendalian internah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

KODE	HIPOTESIS	KETERANGAN
H1	Pemahaman SAP berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah	Diterima
H2	Penerapan SIA berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah	Ditolak
H3	Kompetensi SDM berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah	Ditolak
H4	SPI berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah	Ditolak

PEMBAHASAN

1. Pemahaman SAP berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah

Nilai sig. yang dihasilkan pada uji ini yaitu sebesar 0,012 yang mana nilai sig ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Stewardship, dimana rakyat berperan sebagai *principal* dan pemerintah berperan sebagai *steward*. Steward ini bertugas menyajikan informasi yang layak dan berguna bagi entitas dan para pengguna informasi sehingga dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan, pemerintah perlu memenuhi seluruh komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga menghasilkan kualitas yang baik.

2. Penerapan SIA berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan di SKPD ini. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,828 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05.

Dapat dilihat bahwa pemerintah daerah ini belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi akuntansi yang baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum memiliki kualitas yang memadai. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pemanfaatan dan penguasaan terhadap teknologi komputerisasi. Padahal pemerintah ini sendiri digunakan sebagai wadah dalam penyajian informasi terhadap pentitas atau para pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis dan Wikan (2014) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada kabupaten Semarang.

3. Kompetensi SDM berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah

Penelitian ini menunjukkan hasil nilai signifikan sebesar 0,107 yang mana nilai itu lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis ketiga tidak diterima. Nilai koefisien pada variabel ini sebesar -

0,282 dimana arah negatif menandakan semakin tinggi kompetensi sumberdaya manusia yang ada belum tentu sebanding dengan kualitas laporan keuangan yang dimiliki.

Kuesioner dengan variabel kompetensi sumberdaya manusia pada penelitian ini pada butir pertanyaan nomor satu dan nomor tiga terjadi multikolinearitas terhadap kuesioner variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh pada kuesioner penelitian, dengan tingkat pendidikan tersebut meski dirasa cukup dalam menjalankan tugas dalam bidang keuangan/akuntansi/tata usaha namun dari hasil data menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia yang baik belum tentu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) dimana hal itu diduga disebabkan karena sumberdaya manusia di subbagian akuntansi dan tata usaha keuangan yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

4. SPI berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pada penelitian ini sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di SKPD Kabupaten Klaten ini. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang ada yaitu sebesar 0,551 yang mana nilai itu lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan H_4 ditolak.

Hal ini tidak sesuai dengan Teori Stewardship dimana pemerintah selaku *steward* memiliki tugas untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar membantu *principal* dalam mengambil keputusan. Kualitas sistem pengendalian internal yang buruk akan memberikan dampak yang kurang baik dalam membantu pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa hipotesis ditolak diduga dikarenakan belum adanya penentuan batas dan penentuan toleransi, dan masih kurangnya penerapan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brendhi (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda.
2. Penerapan SIA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemda.
3. Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemda.
4. SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemda.

Terdapat keterbatasan terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu pada kuisioner kompetensi sumberdaya manusia terdapat pertanyaan multikolinear terhadap pertanyaan dari variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah sehingga dapat mengakibatkan *overlap*.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan keterbatasan, maka saran yang dapat disampaikan yaitu untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel yang belum dibahas pada penelitian ini, dan penambahan sampel yang diteliti. Penelitian selanjutnya juga dapat menghapus pertanyaan nomor satu dan tiga atau

memindahkannya ke variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah agar tidak terjadi multikolinearitas. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumberdaya manusia, dan sistem pengendalian internal dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan tersebut dapat ditingkatkan. Pegawai hendaknya melakukan pelatihan-pelatihan untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitatif yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 guna menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiola, Oyewole. 2013. *Internal Control System on Fraud Detection: Nigeria Experience*. Journal of accounting and Finance Vol 13(5).
- Andhini, Dewi, Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dasukerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol 24 No 1.
- Artana, Arlia Sari. 2016. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Skripsi
- Cornelia, K.R.D., Yuniarta, G.A., AK, S., Edy Sujana, S.E., & Msi, A.K. 2016. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Se-Kabupaten Klungkung)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah), 4(1), pp;22-35
- Girsang, Meldawati. 2017 . *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit, Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Penerapan Good Governance Sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan
- Haliah. 2012. *Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Disertasi doktor pada FPS UNHAS Makassar.
- Juwita R. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Penelitian. Trikonomika Volume 12, No. 2
- Karsana, I. Wayan, And I. Gusti Ngurah Agung Suaryana. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli*. E-Jurnal Akuntansi: 643-670. *Keuangan Pemerintah Daerah*. STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1–2014: 15-32.
- Mahaputra dan Putra. 2014. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol:8 No:2 Tahun 2014 .
- Megawati, L. K. S., Sulindawati, N. L. G. E., Se Ak, M., Edy Sujana, S. E., & M.Si, A.K. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*,

Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 3(1), Pp :67

- Mokoginta, Novtania, Linda Lambey, Winston Pontoh. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2).
- Nugroho, Brendhi Septo. 2018. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali)*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Octarina, Deby Ayu. 2016. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan Keuangan pemerintah daerah kabupaten Langkat*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Prakoso, Taufik Sidik. 2018. Klaten Gagal Meraih Opini WTP dari BPK, ini penyebabnya, <https://soloraya.solopos.com/read/20180602/493/919885/klaten-gagal-meraih-opini-wtp-dari-bpk-ini-penyebabnya>. Diakses tanggal 2 Juni 2018.
- Sako, Umar & Felmi D. Lantowa. 2018. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Journal Of Accounting Science Vol. 2 (1).
- Sari, Maeka, M.Y.N.P I Made Pradana Saputra, Edi Sujana. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintahan Kabupaten Jembrana)*. E-Journal S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2 No 1. 2014
- Sartika, Dewi. 2015 . *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Pengetahuan Pengelola Dan Ketersediaan Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Di Kabupaten Kuantan Singingi)*. Vol 2 No 2.
- Setyowati, Lilis, Wikan Istikha. 2014. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang*. SNEB Hal 1.
- Silviana dan Erwin Antoni. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat*, Universitas Widyatama Bandung, dalam Jurnal Manajemen, Vol.6 No.1: hal.1-6
- Sudiarianti, Ni Made, dkk. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*

- Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi. UNDIP. Semarang
- Susilawati dan Dwi Seftihani Riana. 2014. *Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1
- Tawaqal, Irzal, And Suparno Suparno. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 2.4 (2017): 125-135.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wasman, Meilani Purwanti. (2014). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung)*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. Volume 4 No.3
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna, dan Ni Kadek. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. *Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 2, No. 1.
- Yuliani, Safrida, Nadirsyah Nadirsyah, And Usman Bakar. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi* 3.2 (2010): 206-220.
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Universitas Muria Kudus. Kudus.